

Nasionalisme di Tengah Pluralitas dan Kebebasan Pers

Umi Halwati

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
u.halwati@gmail.com

Imam Alfi

IAIN Purwokerto
cita47@gmail.com

Johar Arifin

Uni. Padjajaran Bandung
johararifin74@gmail.com

Abstract: Indonesian is a nation born from the spirit of nationalism. The spirit of independence and freedom from colonialism finally resulted in the spirit of unity among tribes, races, religions and groups to form Indonesian nationalism. Having the same feeling of destiny and experience could defeat ethnic, cultural and religious differences so that the formation of Indonesia nation was created. Nationalism can be interpreted as the ability to love the nation and state. Nationalism is a state of awareness or a national spirit. Nationalism is not just an instrument that acts as plurality gluing externally, but also a vessel that affirms a plural Indonesian identity in its various cultural dimensions. The press with the freedom of news/ information publications has a dual role, namely the media as an information filter and as a media of national unity. The media as an information filter mean that the media has the authority to conceptualize social reality. It is this conceptualization process that needs to be reconstructed into potential in building and campaigning for nationalism. Applicatively media people see that social reality is packaged in the framework of strengthening the values of nationalism. Then the mass media as a mediator of national unity has the function of providing insight and education as well as preventive efforts in reducing the potential for intolerance and the development of nationalism values.

Keywords: Nationalism, plurality, religion, pers

Abstrak: Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terlahir dari semangat nasionalisme. Semangat untuk membentuk sebuah tata kehidupan yang merdeka dan terbebas dari kolonialisme, akhirnya melahirkan semangat antar suku, ras, agama dan antar golongan untuk bersatu membentuk nasionalisme Indonesia. Perasaan senasib dan sepenanggungan yang dialami mampu mengalahkan

perbedaan etnik, budaya dan agama sehingga lahirlah sejarah pembentukan kebangsaan Indonesia. Nasionalisme dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencintai bangsa dan negara. Nasionalisme adalah kesadaran bernegara atau semangat nasional. Nasionalisme atau kebangsaan bukan sekedar instrumen yang berfungsi sebagai perekat kemajemukan secara eksternal, namun juga merupakan wadah yang menegaskan identitas Indonesia yang bersifat plural dalam berbagai dimensi kulturalnya. Pers dengan kebebasan publikasi berita/informasi memiliki peran ganda yakni media sebagai filter informasi dan sebagai media persatuan kesatuan bangsa. Media sebagai filter informasi dimaknai bahwa media memiliki kewenangan melakukan konseptualisasi realitas sosial. Proses konseptualisasi inilah yang perlu direkonstruksi menjadi potensi dalam membangun dan mengkampanyekan nasionalisme. Secara aplikatif insan media memandang bahwa realitas sosial dikemas dalam kerangka penguatan nilai-nilai nasionalisme. Kemudian media masa sebagai mediator kesatuan bangsa memiliki fungsi memberikan wawasan dan edukasi serta usaha-usaha preventif dalam mengurangi potensi intoleran dan pembangunan nilai-nilai nasionalisme bangsa.

Kata Kunci: Nasionalisme, Pluralitas, Agama, Pers

Pendahuluan

Nasionalisme Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terlahir dari semangat nasionalisme. Hal ini disebabkan oleh semangat ingin terbebasnya bangsa Indonesia dari belenggu kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang. Semangat untuk membentuk sebuah tata kehidupan yang merdeka dan terbebas dari kolonialisme akhirnya melahirkan semangat antar suku, ras, agama, dan antar golongan untuk bersatu membentuk nasionalisme Indonesia. Sebelum nasionalisme kebangsaan berkembang dan menyatu dan beriringan dengan situasi dan kondisi Indonesia telah lahir nasionalisme kedaerahan. Secara alami berkembang karena persamaan nasib, agama, suku, dan ras. Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia melepaskan diri dari kolonialisme telah muncul lebih dahulu. Misalnya ditemukan dalam beberapa perlawanan pahlawan nasional seperti perjuangan kemerdekaan Imam Bonjol, Cut Nyak Dien, Pangeran Diponegoro, Patimura, dan lain-lain. Dengan rekam historis ini, maka semangat nasionalisme di Indonesia pada dasarnya memang lahir dari bentuk perlawanan terhadap kolonialisme (Al-faqi

2015). Perlawanan terhadap kolonialisme adalah perlawanan yang benar-benar bersumber pada rasa cinta kepada Tanah Air.¹

Nasionalisme dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dikenal sebagai sebuah kata sakti yang mampu membangkitkan kekuatan berjuang melawan penindasan yang dilakukan kaum kolonialis selama beratus-ratus tahun lamanya. Perasaan senasib dan sepenanggungan yang dialami mampu mengalahkan perbedaan etnik, budaya, dan agama sehingga lahir sejarah pembentukan kebangsaan Indonesia (Anggraeni and Faturochman 2004).

Wawasan kenusantaraan di Indonesia berpijak melalui peristiwa Sumpah Palapa yang dilakukan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubhumi Majapahit, tahun 1258 Saka (1336 M). Sumpah ini merupakan suatu pernyataan bahwa Majapahit adalah sebuah Negara yang memiliki visi menyatukan pulau, suku, dan kerajaan-kerajaan lain di bawah satu kesatuan Majapahit. Persitiwa ini sekaligus menjadi Tonggak sejarah yang dalam proses nasionalisme di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya nasionalisme yang ada dikaitkan dengan peristiwa Sumpah Palapa tersebut. Seperti lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908, diikuti ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yang mengilhami lahirnya konsep bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia dan berbahasa Indonesia. Proses nasionalisme tersebut berlanjut dan melandasi perjuangan-perjuangan berikutnya hingga lahir Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah melalui proses yang sangat panjang dan berat. Keberhasilan bangsa Indonesia lepas dari penjajahan melalui perjuangannya sendiri juga melahirkan pengakuan dunia bahwa nasionalisme Indonesia termasuk

¹ Perlawanan terhadap penjajah juga tidak dapat dilepaskan dari peran kiai dan santri. Salah satu bukti heroiknya perlawanan kiai dan santri pada November 1945 dilukiskan dalam berita Kedaulatan Rakyat edisi 26 November 1945 "*Kesaktian kijai2 di medan pertempoeran boekan hanja berita lagi, tapi kita saksikan sendiri. Banjak mortar yang melempem, bom tidak meledak dsbnja lagi*". Salah satu kiai yang memiliki peran signifikan dalam memupuk dan menumbuhkembangkan semangat rasa cinta tanah air adalah KH Abdul Wahab Hasbullah, melalui lagu "*Syubbanul Wathan*", lagu yang sangat patriotis sarat dengan muatan rasa cinta tanah air, instrument yang menggelorakan semangat rasa cinta tanah air, menjadi semacam resonansi yang terus menggemakan semangat nasionalisme. Dalam lirik lagu tersebut disebutkan, "*Pusaka hati wahai tanah airku/Cintaku dalam imanku/Jangan halangkan nasibku/Bangkitlah hai bangsaku/Indonesia Negeriku/Engkau paji martabatku/Siapa datang mengancammu/ Kan binasa di bawah dulumu (berdarah-darah)*". Helmy Faishal Zaini, *Nasionalisme Kaum Sarungan*, *Kompas*, 21 Oktober 2017.

salah satu yang terkuat. Hal tersebut dikarenakan hanya sedikit negara dari dunia ketiga yang mampu merdeka melalui proses revolusi (Anggraeni and Faturochman 2004).

Lahirnya nasionalisme di Indonesia disebabkan penderitaan panjang dibidang ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, dan politik. Sejarah terbentuknya nasionalisme di Indonesia disebabkan adanya perasaan senasib dan sepenanggungan yang merupakan suatu reaksi subjektif, dan kondisi objektif yang secara geografis menemukan koneksitasnya. Ada perbedaan kausal antara nasionalisme di Indonesia dengan nasionalisme di Eropa, yaitu nasionalisme di Indonesia muncul sebagai reaksi terhadap penjajahan kolonial, tetapi di Eropa, nasionalisme lahir akibat adanya pergeseran dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri sebagai dampak dari revolusi industri (Anggraeni and Faturochman 2004).

Nasionalisme Indonesia melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara. Perjuangan yang lama untuk mencapai kemerdekaan kini telah terwujud. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah sebagai puncak perjuangan, dan sekaligus pertanda bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara yang berdaulat, merdeka, dan mandiri. Hal itu diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus, menjadi simbol kekuasaan besar yang revolusioner, mengandung persamaan dan persaudaraan (Kahin 1995). Demikian pula, dengan disahkannya UUD 1945, semangat dan jiwa proklamasi, yaitu Pancasila, memperoleh bentuk dan dasar hukumnya yang resmi sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia. Negara-bangsa Indonesia sudah final dengan empat prinsip pokok; UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika (Kahin 1995).

Hari ini, liberalisasi politik melalui demokratisasi di Indonesia sekaligus mendatangkan sejumlah tantangan baru, termasuk dalam relasi Islam dengan nasionalisme. Di kalangan umat Islam Indonesia bangkit kembali gagasan tentang pembentukan negara Islam (*daulah Islamiyyah*) atau setidaknya perubahan UUD 1945 dengan mengembalikan 'Piagam Jakarta' yang memungkinkan pemberlakuan syari'at Islam oleh negara (Azra 2017). Oleh karena itu, bagaimana kondisi objektif keragaman Indonesia; Konsep pluralitas dalam perspektif Islam; Tentang definisi nasionalisme; Agama dan nasionalisme; Tantangan nasionalisme

Indonesia; Respon organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap keragaman dan nasionalisme; serta solusi atas tantangan nasionalisme akan dibahas dalam tulisan ini.

Kondisi Objektif Keragaman (Pluralitas) Indonesia

Indonesia adalah suatu bangsa yang masyarakatnya plural (beragam) baik secara horizontal maupun secara vertikal. Secara horizontal, terlihat dari adanya perbedaan ras, suku bangsa, budaya, dan agama. Secara vertikal, adanya perbedaan strata sosial berdasarkan faktor ekonomi dan politik. Keragaman (*diversity*) merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin terelakkan, baik keragaman budaya, suku, bangsa, bahasa, dan agama (Rozak 2008).

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Secara umum, masyarakat majemuk akan rentan/berpotensi menimbulkan konflik sosial. Konflik sosial cenderung muncul sebagai akibat dari sikap keragaman budaya, kesukuan, agama dan lain-lain. Sikap yang dapat menstimulan konflik sosial adalah eksklusifisme, fundamentalisme, radikalisme, konservatisme, primordialisme kesukuan, ras dan agama. Keragaman suku, ras, dan agama dimasyarakat adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, membangun Indonesia dengan wawasan keberagaman dan harmoni dalam bingkai nasionalisme menjadi urgen dan terus ditingkatkan (Rozak 2008).

Kemajemukan Indonesia secara objektif adalah negara yang berkepulauan. Keberagaman pulau tersebut melahirkan kemajemukan secara sosial budaya. Suku, bahasa, adat istiadat, dan agama yang menunjukkan tingkat signifikansi hetegorenitas. Akan tetapi, kemajemukan adalah *sunnatullah* yakni tradisi Allah dalam melaksanakan ketetapanNya sebagai *Rabb* yang terlaksana di alam semesta atau dalam bahasa akademis disebut hukum alam. Maka kemajemukan harus dipahami sebagai anugerah dan keniscayaan. Sedangkan pluralitas sesungguhnya bertujuan untuk saling melengkapi antara sesama manusia dan alam semesta. Pluralitas juga termasuk dalam soal keyakinan (Madjid 2000).

Pluralisme menurut Nurcholis Madjid adalah sebuah keniscayaan Tuhan (hukum alam atau "*sunnatullah*") yang tidak akan berubah, sehingga tidak mungkin dilawan (Madjid 2000). Pluralisme menurut

Nurcholis Madjid memandang suatu sistem nilai secara positif-optimis terhadap kemajemukan itu sendiri, dengan menerimanya sebagai kenyataan dan berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan tersebut (Madjid 2000).

Konsep Pluralitas dalam Perspektif Islam

Beberapa konsep tentang pluralitas adalah² bahwa pluralitas tidak hanya menunjuk adanya kenyataan kemajemukan, tetapi mengakui keberadaan dan hak agama lain serta terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan agar tercapai kerukunan dalam kebinekaan (Shihab 1999). Sebagai agama yang secara prinsipil menyatakan diri sebagai bagian integral dari agama-agama sebelumnya, Islam memberikan prinsip dasar dalam menyikapi dan memahami pluralitas. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut (Muslich and Qohar 2013).

1. Prinsip keragaman yang lapang atau inklusifisme relatif. Salah satu masalah dalam menyikapi keragaman adalah masalah klaim kebenaran. Islam tidak membenarkan kefanatikan buta dalam mencari kebenaran. Untuk mencapai kepasrahan yang tulus kepada Tuhan diperlukan suatu pemahaman yang sadar bukan sekedar ikut-ikutan. Sikap kelapangan dalam mencapai kebenaran ini bisa dikatakan sebagai makna terdalam dari Islam itu sendiri. Dengan memiliki sikap inklusif, maka bisa menghargai pluralitas keragaman dengan elegan, tidak jatuh pada klaim-klaim kebenaran yang sebenarnya merupakan kesombongan intelektual dihadapan orang lain yang dianggap tidak mampu mencapai kebenaran dari Tuhan.
2. Keadilan yang objektif. Dalam konteks keragaman, keadilan mencakup pandangan maupun tindakan orang Islam terhadap pemeluk agama lain. Tidak membuat generalisasi terhadap suatu agama hanya karena melihat dan menyaksikan beberapa orang melakukan hal-hal buruk kemudian digeneralisasikan dan menyimpulkan bahwa semua pemeluk agama tersebut berbuat buruk.

² Konsep tentang pluralisme sampai saat ini belum disepakati definisinya, hal ini karena batas-batas pluralism yang berbeda-beda, sehingga definisinya pun masih debatable. Begitupun istilah pluralism dan pluralitas untuk menunjuk pada keragaman masih belum mempunyai kesepakatan definisi. Seharusnya batas-batas pluralism disepakati agar ada konsep yang jelas tentang pluralisme.

3. Menjauhi kekerasan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain termasuk dalam melakukan dakwah. Tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk berdakwah dan memaksa pemeluk agama lain untuk masuk agama Islam.
4. Menjadikan keragaman agama (*religious pluralism*) sebagai kompetisi positif dalam kebaikan. Salah satu hikmah diciptakannya manusia berbeda-beda adalah supaya bisa saling mengenal dan keragaman tersebut memacu manusia untuk bersaing menjadi yang terbaik diantara umat agama lain dalam hal berbuat kebajikan.

Pluralitas adalah *sunnatullah*. Pluralitas sesungguhnya bertujuan untuk saling melengkapi antara sesama manusia dan alam semesta. Pluralitas termasuk pula dalam soal keyakinan. Ayat Al-Qur'an surat al-Haj ayat 40³ meneguhkan keberadaan pluralitas agama. Petunjuk tegas ini membuktikan kesantunan dan kelapangan ajaran Islam yang begitu memahami atas pluralitas agama. Hal ini tidak hanya sebagai wacana tetapi dibuktikan melalui tindakan yang ramah dan toleran. Dipertegas pula dengan makna Islam sendiri yang berarti ketundukan. Yaitu ketundukan kepada *sunnatullah*. Ketika telah mengaku secara formal sebagai muslim, sesungguhnya telah mengikrarkan diri untuk senantiasa setia dan tunduk pada *sunnatullah*. Pembangkangan terhadap *sunnatullah* dalam istilah agama disebut kafir. Oleh karena itu, tidak mudah mengkafirkan sesama (Siradj 2005).

Pluralisme menurut Nurcholis Madjid adalah sebuah keniscayaan Tuhan (hukum alam atau "*sunnatullah*") yang tidak akan berubah (Madjid 2000). Pluralisme memandang suatu sistem nilai secara positif-optimis terhadap kemajemukan dan menerimanya sebagai kenyataan (Siradj 2017b). Oleh karena itu, paham kemajemukan adalah satu nilai keislaman yang seharusnya dihargai karena ia salah satu ajaran pokok Islam (Madjid 2000).

Menurut Mehmet S. Aydin (Aydin 2009), seorang sarjana Teologi dan Filsafat kelahiran Turki, istilah pluralisme adalah sesuatu yang baru, akan tetapi masalah yang ditunjukkan sama tua dengan sejarah manusia.

³ "Dan sekiranya Allah tiada menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak dikumandangkan nama Allah".

Yaitu pluralisme secara deskriptif dan preskriptif. Secara deskriptif merujuk kepada kemajemukan dan keserbaragaman budaya, politik, etnis, ras, dan agama sebagai fakta. Secara preskriptif merujuk pada kebijakan bahkan penanganan terhadap area-area itu secara sosial, politik dan bahkan eskatologis. Keserbaragaman agama merupakan ketetapan Tuhan. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan adalah yang diminta Tuhan dari semua orang yang beriman. Tetapi bila saling pengertian dan saling kerjasama gagal, pemaksaan tidak boleh menjadi pilihan.

Islam secara substansial didasarkan atas al-Qur'an yang dipercayai disampaikan melalui wahyu oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad. Karena al-Qur'an sering dirujuk sebagai "pengungkapan Tuhan melalui kata" atau "pengungkapan Tuhan melalui kitab suci". Premis ini mempunyai implikasi yang banyak memperkuat pandangan seperti pandangan dunia yang bersumber dari Tuhan, pandangan yang berorientasi pada masyarakat, pemerintahan Tuhan, dan sebagainya. Implikasi-implikasi ini menjadi tantangan dari berbagai bentuk pluralisme (Aydin 2009).

Model pluralisme yang bersyarat komitmen kokoh terhadap agama masing-masing dicontohkan oleh Rasulullah baik dalam ucapan maupun tindakan. Pluralisme yang diajarkan nabi tidak melebur perbedaan, tetapi menghormati perbedaan. Setiap kelompok telah memilih jalan dan tatanan hidup masing-masing. Oleh karena itu, masing-masing harus saling menghargai dan berpacu mencapai prestasi kebaikan (Shihab 1999).

Saat Nabi berkuasa di Madinah, Nabi berpesan "Siapa yang mengganggu umat agama Samawi, maka ia telah mengganguku" (Shihab 1999) Nabi Muhammad di Madinah tidak melegitimasi agama resmi negara saat itu, dan tidak memaksa orang-orang untuk memeluk Islam seluruhnya (Kahmad 2002). Akan tetapi Nabi Muhammad mengungkap kearifan. Tidak mengusir non-muslim dari Madinah. Nabi justru mengajak bersama-sama membangun tatanan sosial dengan merumuskan *mitsaq al-Madinah* (Piagam Madinah). Ketika terjadi pembebasan kota Makkah (*Fathu Makkah*), masyarakat non-Muslim tidak dibantai atau dipenjara, tetapi diampuni tanpa syarat. Sikap pemurah dan pemaaf ini menjadikan banyak masyarakat Makkah masuk Islam (Siradj 2005).

Nabi mendemonstrasikan kepada setiap orang cara-cara yang mungkin dapat dilakukan untuk dapat hidup berdampingan melalui realisasi sebuah

proyek sosial yang pluralis berdasarkan otonomi keagamaan dan hukum. Risalah ini akan disebarluaskan dengan tidak seorangpun akan dipaksa untuk pindah agama melalui kekuatan dan tekanan. Orang-orang yang pindah agama tidak akan menemukan oposisi (Bulac 2003).

Dari ilustrasi di atas, keragaman Indonesia perlu disikapi dengan memperkokoh semangat nasionalisme Indonesia agar ditengah masyarakat Indonesia yang majemuk tetap harmonis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tentang Definisi Nasionalisme

Menurut Jawaharlal Nehru, nasionalisme lebih mudah untuk dipahami sebagai suatu paham yang muncul dari kesadaran nasionalitas. Yaitu kesadaran untuk membangun kedaulatan dan batas-batas negara serta upaya membangun loyalitas terhadap negara-bangsa. Nasionalisme juga berarti berjuang untuk melepaskan diri dari kolonialisme dan menjadi anggota Negara-negara merdeka (Truna 2010).

Menurut Sarman sebagaimana dikutip oleh Anggraeni, secara kritis menulis sempitnya kerangka pikir sebagian besar orang mengenai nasionalisme. Menurutnya, nasionalisme sering diartikan sebagai kecintaan terhadap tanah air yang tanpa *reserve*, yang merupakan simbol patriotism heroik semata sebagai bentuk perjuangan yang seolah-olah menghalalkan segala cara demi negara yang dicintai. Definisi tersebut menyebabkan makna nasionalisme menjadi usang dan tidak relevan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masa kini, yang tidak lagi bergelut dengan persoalan penjajahan dan merebut kemerdekaan dari tangan kolonialis (Anggraeni and Faturochman 2004).

Menurut Hara yang dikutip Anggraeni, nasionalisme mencakup konteks yang lebih luas yaitu persamaan keanggotaan dan kewarganegaraan dari semua kelompok etnis dan budaya di dalam suatu bangsa. Dalam kerangka nasionalisme, juga diperlukan sebuah kebanggaan untuk menampilkan identitasnya sebagai suatu bangsa. Kebanggaan itu sendiri merupakan proses yang lahir karena dipelajari dan bukan warisan yang turun temurun dari satu generasi kepada generasi berikutnya (Anggraeni and Faturochman 2004).

Nasionalisme secara etimologi berasal dari kata “*nasional*” dan “*isme*” yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurangberuntungan saudara setanah air, sebangsa dan senegara serta menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Dari pengertian tersebut nasionalisme dapat diartikan sebagai paham tentang kebangsaan dan sikap cinta tanah air yang tinggi yang harus dimiliki oleh warga negara, merasa memiliki sejarah dan cita-cita yang sama dalam tujuan berbangsa dan bernegara (Al-faqi 2015).

Suatu bangsa hanya dapat muncul apabila terdapat keinginan untuk hidup bersama, adanya jiwa dan pendirian rohaniah, adanya perasaan setia kawan yang besar yang terbentuk bukan disebabkan persamaan ras, bahasa, agama atau batas-batas negeri. melainkan terbentuk karena pengalaman-pengalaman historis yang menjembatani kesediaan untuk berkorban bersama. Suatu bangsa adalah sekelompok manusia dengan persamaan karakter atau watak yang tumbuh karena persamaan nasib atau pengalaman yang telah dijalani. Nasionalisme merupakan suatu kesadaran rakyat sebagai suatu bangsa (Al-faqi 2015).

Di dalam nasionalisme terdapat unsur yang disepakati yaitu kemauan untuk bersatu dalam bidang politik suatu kebangsaan (nasional). Nasionalisme dianggap telah muncul ketika suatu bangsa memiliki cita-cita yang sama untuk mendirikan suatu negara kebangsaan. Kata kunci nasionalisme adalah *supreme loyalty* terhadap kelompok bangsa. Kesetiaan tersebut muncul karena adanya kesadaran identitas kolektif yang berbeda dengan yang lain. Hal itu terjadi karena kesamaan keturunan, bahasa atau kebudayaan. Hal tersebut bukan unsur yang substansial, yang terpenting adalah kemauan untuk bersatu (Yatim 1999).

Agama dan Nasionalisme

Tentang nasionalisme disampaikan oleh (Siradj 2017b), ada tiga konsep tentang *ukhuwah* (persaudaraan), yaitu *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan umat Islam), *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan bangsa), dan *ukhuwah basyariyah* (persaudaraan umat manusia). Di sini, di tekankan pada pentingnya *ukhuwah wathaniyah*. Sebab, tanpa negara,

umat Islam tidak bisa melakukan kegiatan keagamaannya.

Oleh karena itu, cinta tanah air penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya tanah air dapat dilihat dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah. Nabi ingin mempunyai tanah air (negara) sehingga dakwah Islam bisa berkembang dengan baik. Ini pula mengapa Al Quran masih menyebut-nyebut tentang kisah Fir'aun serta kisah para nabi lainnya. Sebab, kisah-kisah tersebut mengungkapkan adanya sejarah tentang tanah air atau daerah yang pernah dihuni oleh raja-raja terdahulu dan para nabi dalam menjalankan roda pemerintahan dan misi kenabiannya (Siradj 2017a).

Dalam konteks ini, pepatah Arab mengatakan, “Barang siapa yang tidak memiliki tanah air, ia tidak memiliki sejarah. Dan barang siapa yang tidak memiliki sejarah, akan terlupakan”. Contoh nyata adalah bangsa Kurdi yang tidak memiliki tanah air sehingga tercerai-berai hidup berdiaspora di Turki, Irak, dan Suriah (Siradj 2017b).

Memang harus diakui bahwa dilingkungan keagamaan kerap muncul pandangan yang memperlawankan antara nasionalisme dan agama. Bahkan, banyak kelompok keagamaan yang menolak nasionalisme dan malah menyebutnya sebagai “kafir” atau *thoghut*. Itulah mengapa tidak mengherankan jika di negeri-negeri di mana mayoritasnya umat Islam justru kerap terjadi pertumpahan darah. Hal ini bisa dilihat Afganistan, Somalia, Irak, Yaman, atau Suriah. Konflik di negeri-negeri muslim ini tampak sudah berada di ambang batas kemanusiaan (Siradj 2017b).

Tragedi-tragedi pertumpahan darah dan perang saudara di Timur Tengah tersebut menunjukkan, ternyata kesamaan dalam agama belum atau tidak mampu menyatukan masyarakatnya. Somalia atau Afganistan, misalnya, 100 persen rakyatnya memeluk Islam. Namun, yang terjadi perang saudara, saling rebut kekuasaan dan penindasan oleh rezim berkuasa. Itulah tragedi ironis yang terjadi di Timur Tengah di mana agama Islam menjadi mayoritas di sana (Siradj 2017a). Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim menjadi *showcase*, contoh keberhasilan, kompatibilitas antara Islam dan demokrasi. Melihat Dunia Islam lebih luas, sulit menemukan negara berpenduduk mayoritas muslim lain yang berhasil dalam transisi dan konsolidasi demokrasinya (Siradj 2017a).

Untuk memahami hubungan antara agama dan nasionalisme, Balitbang Diklat Kementerian Agama pada 2015 melakukan penelitian tentang penggalan dan perumusan nilai-nilai agama yang terdapat di kitab suci, teologi, hukum dan etika keagamaan yang mendukung NKRI. Poin NKRI merujuk pada bentuk negara nasional, Pancasila, UUD 1945, dan kemajemukan. Hasilnya, dalam semua agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, semuanya terdapat ajaran-ajaran yang mendukung nasionalisme (Niam 2016).

Di katakan Hadratus syaikh Hasyim Asy'ari, bahwa agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan (Asyari 2017). Sebagai usaha merawat nasionalisme KH. Hasyim Asy'ari membuat jargon atau adagium *hubbul wathan minal iman*. Dalam pandangan KH Said Aqil Siradj penerjemahan *hubbul wathan minal iman* adalah nasionalisme bagian dari iman (Zaini 2017).

Hubungan antara Islam dan nasionalisme di Tanah Air telah terintegrasi sehingga negara-bangsa Indonesia sudah final dengan empat prinsip pokok; UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Meski demikian, perlu tetap diingat bahwa integrasi Islam dan nasionalisme itu tidak bisa dipandang selesai (*taken for granted*). Sebaliknya senantiasa perlu penguatan keempat prinsip dasar dan sekaligus meningkatkan aktualisasi sistem dan nilainya dalam kehidupan berbangsa-bernegara. Tanpa itu, boleh jadi kian banyak warga yang kehilangan kepercayaannya pada integrasi Islam dan nasionalisme Indonesia (Siradj 2017b).

Agama dan nasionalisme merupakan dua faktor kunci yang menjaga eksistensi sekaligus memelihara peradaban bangsa. Tidak bertentangan dengan agama apapun. Rasa cinta terhadap tanah air telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari perpecahan. Nilai-nilai kebangsaan berbasis agama yang dibangun para pendahulu bangsa tertanam dalam setiap generasi penerus bangsa Indonesia, sehingga perbedaan SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) tidak dapat dijadikan alat untuk merusak bangsa oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab (Siradj 2017b).

Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran (Shihab 2000) menyatakan bahwa unsur-unsur nasionalisme dapat ditemukan dalam Al-Quran antara lain persamaan keturunan, persamaan bahasa, persamaan

adat istiadat, persamaan sejarah, cinta tanah air, dan membela negara. Penggunaan istilah nasionalisme oleh beberapa pakar digunakan bergantian dengan istilah rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Nasionalisme merupakan sikap yang tidak bertentangan dengan ajaran agama apapun. Nasionalisme adalah bagian dari iman, yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia dari perpecahan.

Dalam Islam dikenal beberapa terminologi yang mendekati konsep kebangsaan, yaitu *ummah*, *syu'b* dan *qawn*. Pertama, *Ummah* dalam Bahasa Indonesia menjadi ummat. Dari akar kata yang sama lahir antara lain kata 'umm' yang berarti 'ibu' dan *imam* yang berarti 'pemimpin'. Kedua menjadi teladan dan harapan anggota masyarakat. Kata 'umm' mengandung pengertian sekelompok manusia yang berhimpun karena didorong oleh ikatan persamaan sifat, kepentingan, cita-cita, agama, wilayah tertentu dan waktu tertentu (Nurdin 2006).

Quraish Shihab berpendapat bahwa dalam kata *ummah* terselip makna cukup dalam. *Ummah* mengandung arti gerak dinamis, arah, waktu, jalan yang jelas serta gaya dan cara hidup. Untuk hal tersebut dibutuhkan waktu dalam mencapainya. Al-Qur'an Surat Yusuf :54 menggunakan kata *ummah* untuk waktu, sedangkan dalam surat al-Zukhruf untuk arti jalan atau gaya dan cara hidup (Shihab 2000).

Kedua, *Syu'b*. *syu'bah*, *syu'bah* dan *insyi'ab* adalah istilah yang mempunyai arti bahwa bangsa manusia di bumi terbagi dalam berbagai cabang (*syu'bah*). Setiap cabang merupakan suatu bangsa tersendiri. Artinya mereka memisahkan diri dalam berbagai kelompok dan kelompok itu merupakan cabang dari kumpulan manusia (Pulungan 1994).

Ketiga, *Qawn*. *Qawn* akar katanya terdiri dari *qaf*, *wau* dan *mim* memiliki dua makna dasar, yaitu kelompok manusia dan berdiri tegak atau tekad. Al-Raghib al-Asfihani menjelaskan bahwa kata *qawn* seakar dengan kata *qama-yakumu-qiyaman* yang berarti berdiri. Kata tersebut dapat berarti pula memelihara sesuatu agar tetap ada. Secara leksikal, *qawn* adalah kelompok manusia yang dihimpun oleh suatu hubungan atau ikatan yang mereka tegakkan ditempat *qawn* tersebut berada. Oleh karena itu, kata *qawn* berkonotasi sebagai kelompok manusia yang mengurus suatu urusan tertentu (Nurdin 2006).

Tantangan Nasionalisme Indonesia

Nasionalisme bagi Bung Karno adalah cinta sepenuh hati kepada Indonesia, rasa bangga bahwa “kita orang Indonesia, adalah suatu rasa persatuan diantara orang-orang yang sedemikian berbeda, yang terbangun dalam sejarah penderitaan karena penjajahan dan perjuangan pembebasan bersama selama ratusan tahun (Suseno 2006).

Nasionalisme dewasa ini digerosoti oleh dua arah yaitu oleh globalisasi dan Fundamentalisme, radikalisme dan konservatisme. Globalisasi menjadikan dunia mudah dijangkau dan mudahnya memperoleh informasi. Globalisasi dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurang. Globalisasi mampu membuka cakrawala masyarakat secara global. Apa yang di luar negeri dianggap baik memberi aspirasi kepada masyarakat kita untuk diterapkan di negara kita begitu juga sebaliknya. Sedangkan Fundamentalisme, radikalisme dan konservatisme mengajarkan sikap intoleran, inklusif, tertutup, dan sulit menerima perbedaan. Istilah radikalisme, fundamentalisme, revivalisme Islam, dan politik Islam merupakan istilah yang sering digunakan secara bergantian untuk menyebutkan sebuah gerakan Islam yang memiliki visi tertentu. Menurut Esposito seperti dikutip Hasbi Aswar, terminologi fundamentalisme diterapkan dalam spektrum yang luas berkaitan dengan gerakan-gerakan atau aktor-aktor Islam yang memiliki visi untuk mengembalikan visi Islam seperti yang pernah terjadi di masa lalu (*romanticized past*) (Aswar 2016).

Fundamentalisme ideologi, radikalisme dan konservatisme menyingkirkan keanekaan nilai budaya dan kemanusiaan bangsa (Suseno 2006). Fundamentalisme ideologi melahirkan Gerakan formalisasi agama dalam bentuk pendirian negara agama (Islam) dalam kehidupan kenegaraan. Fenomena tersebut pada dasarnya pernah muncul pada awal Kemerdekaan RI. Gerakan pendirian negara agama tidak selesai setelah disepakatinya ideologi Pancasila dengan sila *Ketuhanan Yang Maha Esa* antara Mohammad Hatta dengan KH Abdul Wahid Hasyim dkk, gerakan itu masih terus bermunculan di belakang hari seperti gerakan pendirian negara Islam di Jawa Barat yang dipelopori Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, Kahar Muzakkar di Sulawesi, dan Daud Beureueh di Aceh (Dahlan 2014).

Ketika kran demokrasi dibuka lebar, ada tiga gejala yang dapat ditengarai dari paham radikalisme, yaitu pertama, merespons terhadap kondisi sosial-politik maupun ekonomi yang sedang berlangsung dalam bentuk penolakan dan perlawanan. Terutama aspek ide dan kelembagaan yang dianggap bertentangan dengan keyakinannya. Kedua, dari penolakan berlanjut pada pemaksaan kehendak untuk mengubah keadaan secara mendasar kearah tatanan lain yang sesuai cara pandang dan cara berpikir yang berafiliasi pada nilai-nilai tertentu, misalnya agama atau ideologi tertentu. Ketiga, menguatkan sendi-sendi keyakinan tentang kebenaran ideologi yang diyakininya lebih unggul dari pada yang lain. Sikap tersebut dapat memuncak pada sikap penafian sistem lain. Untuk mendorong upaya tersebut, ada pelibatan massa atas nama rakyat atau umat yang diekspresikan secara emosional-agresif (M.N. 2005).

Hasil penelitian disertasi Haedar Nashir dengan judul *Islam Syari'at Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia (2007)*, menyebutkan ada beberapa kelompok yang getol melakukan perubahan secara radikal yaitu *pertama*, kelompok revivalis yang tampil dengan ciri legal-formal yang menuntut perubahan sistem hukum yang sesuai tata aturan dan tuntunan hukum agama. *Kedua*, kelompok revivalis yang tampil secara doktriner dengan cara memahami dan mempraktekkan agama serba mutlak dan kaku. *Ketiga*, kelompok revivalis yang tampil dengan ciri militan dan ditunjukkan melalui sikap keagamaan bersemangat tinggi sampai berhaluan keras. Bahkan melakukan penolakan terhadap Pancasila dan bersikukuh ingin menjadikan syari'ah sebagai penggantinya (M.N. 2005).

Dengan menggunakan adagium agama, digunakan label 'Islamisasi' untuk memaksakan kehendak radikalnya untuk melakukan perlawanan kepada yang dianggap tidak sejalan dengan agenda politiknya. Ada pula kelompok lain yang mensistematisasi gerak perlawanan untuk mengganti sistem negara Indonesia kepada model "*khilafah*"⁴. Sikap-sikap tersebut dapat melahirkan benih-benih ekstrimisme yang lebih masif dan sistematis.

Perlu diakui, tantangan yang dihadapi untuk menjaga kohesivitas sosial di Indonesia tidak sederhana. Hal itu ditandai dengan adanya kelompok yang memberi pemahaman berbeda. Pemahaman agama yang

⁴ Seperti yang disuarakan HTI (organisasi HTI kini telah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia)

konservatif, kini ditengarai mulai masuk hingga ke sejumlah sekolah melalui mentor keagamaan yang modulnya tidak moderat. Kondisi ini disinyalir ikut memunculkan kasus-kasus intoleransi terhadap kelompok yang dianggap berbeda. Menguatnya pemahaman agama yang konservatif ini tidak terlepas dari adanya kontestasi identitas serta ekonomi politik (Kompas 2017b).

Persoalan kebangsaan dan intoleransi membutuhkan perhatian ekstra karena dinamika sosial politik yang cukup kompleks. Tantangan dan persoalan bangsa ke depan antara lain berakar dari persoalan ekonomi yang melahirkan kesenjangan keadilan sosial. Permasalahan ekonomi juga memicu masalah intoleransi. Salah satu buktinya adalah rasio gini yang tercatat 0,397 pada Maret 2016. Laporan data perusahaan manajemen investasi global Credit Suisse pada 2014 menunjukkan 1 persen kelompok terkaya Indonesia menguasai 50,3 persen dari total aset uang dan properti Indonesia. Ketika masalah ekonomi memunculkan kesenjangan sosial, siapapun bisa terpicu bersikap intoleransi (Kompas 2017b). Oleh sebab itu, kajian mengenai pembangunan hubungan antara agama dan negara yang ideal memiliki makna yang penting dalam kehidupan negara di Indonesia.

Di sisi lain, tantangan globalisasi berkesan membuat identitas bangsa menjadi sesuatu yang ketinggalan jaman (Suseno 2006). Jati diri sosial manusia era globalisasi yang kompeten terdiri atas pelbagai lapisan solidaritas yang terintegrasi dalam kepribadian yang dewasa. Lapisan-lapisan itu adalah keluarga, kampung, umat beragama, jaringan komunikasi profesi dan bangsa. Manusia yang dewasa merealisasikan dirinya secara harmonis dalam semua lingkaran kesosialan dengan bersikap terbuka terhadap inovasi. Makin lengkap jati diri sosial seseorang, makin kompeten dalam membawa diri menghadapi tantangan globalisasi (Suseno 2006).

Akan tetapi, jika orang menemukan jati dirinya secara eksklusif hanya dalam satu dari dimensi-dimensi kesosialan ini, maka akan mengalami sebuah distorsi dalam kepribadiannya dan semakin lumpuh kemampuannya dalam berkomunikasi. Melawan eksklusifitas ideologis, penghayatan kebangsaan merupakan aset yang penting. Sebaliknya, orang yang melihat segala sesuatu hanya melalui sudut pandang agama, menjadi buta nilai karena yang diminati bukan yang menyatakan diri sebagai pantas

diminati, melainkan yang diajarkan oleh agama (Suseno 2006).

Frans Magnis Suseno menilai ada tiga hal yang mengancam keberlangsungan ideologi Pancasila, yaitu, pengamalan Pancasila yang tidak utuh atau berdasarkan salah satu sila, kehadiran ideologi asing yang eksklusif untuk menonjolkan etnis atau agama tertentu, serta adanya kelompok minoritas yang terpinggirkan/ancaman tersebut telah dirasakan, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan pendiri bangsa melalui Pancasila harus kembali dipahami. Pancasila adalah suatu yang hakiki bagi kemajuan dan eksistensi bangsa Indonesia, bahkan Pancasila juga telah menjadi jalan keluar terhadap sejumlah konflik yang terjadi. Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang mampu menjaga kemajemukan Indonesia. Hal ini karena Pancasila menjamin semua agama, kelompok etnis, suku dan golongan yang ada diseluruh wilayah Indonesia (Kompas 2017a).

Arus globalisasi juga memunculkan kecenderungan untuk mencari jawaban atas pertanyaan keagamaan dengan cara instan melalui media sosial dan internet. Padahal mengkaji pemahaman agama harus melalui lembaga pengkajian dan lewat bacaan yang memadai (Kompas 2017b).

Berhadapan dengan tantangan nasionalisme yaitu globalisasi maupun fundamentalisme ideologi, nasionalisme merupakan unsur kunci dalam menjamin keterbukaan hakiki masyarakat terhadap kekayaan nilai-nilainya yang merupakan modal dasar hidup bersama dengan baik dan sinergis. Seseorang maupun sekelompok orang Indonesia tidak utuh sebagai manusia Indonesia kalau tidak merasakan cinta kepada bangsa dan negaranya, kalau tidak merasa bangga sebagai orang Indonesia, kalau tidak sedikitpun terharu berhadapan dengan simbol-simbol kebangsaan seperti dengan bendera nasional atau lagu kebangsaan (Suseno 2006).

Seandainya rasa kebangsaan itu mati, bangsa Indonesia akan mati dan negara hancur. Karena yang mempersatukan etnik, suku dan komunitas, penganut beberapa agama yang hidup di atas ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke hanya kebangsaan Indonesia. Tidak ada yang dapat menggantikan rasa kebangsaan (Suseno 2006).

Pers dan Publikasi Nilai-nilai Nasionalisme

Setelah dibukanya kran demokrasi, dapat disaksikan kebebasan pers yang dimiliki oleh penggiat media dalam berbagai informasi yang

disampaikan kepada *public*. Public konsumen industri media telah memasuki *symbolic hypermarkets*, di mana publik mempunyai kebebasan penuh untuk memilih sekaligus memaknai kesemua teks yang disajikan pers. Oleh karena itu, di tengah kebebasan pers, media idealnya tetap tidak lalai dengan fungsinya.

Dalam konteks komunikasi, pers merupakan media massa berfungsi menyalurkan, mempublikasikan, dan memperlancar sampainya pesan komunikasi kepada komunikan atau khalayak. Memperlancar artinya mempermudah penerimaan khalayak baik dari segi pengertiannya maupun perolehannya. Oleh karena itu, dalam hal ini pers berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang mau dan mampu menerjemahkan pesan komunikasi yang dimaksud komunikator ke dalam pesan komunikasi yang bisa dipahami komunikannya. Penerapannya dalam kehidupan masyarakat, pers membawa fungsi *informative* dan *interpretative* mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan, sebagai alat kehidupan sehari-hari, penghibur, alat untuk mempertahankan prestis sosial, dan sebagai penghubung dalam pengertian untuk mempertahankan kehidupan dimana ukuran moral terus berkembang (Suhandang 2004).

Pers juga berperan dalam pendidikan, penerangan, dan komentar. Dalam pendidikan, menurut Suhandang (Suhandang 2004) adalah mempertegas, karena penerima informasi tentunya sudah memiliki kesiapan sebelum menerima informasi. Fungsi pers dalam pendidikan yang lain adalah untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang kemajuan yang terus berkembang sehingga membawa pikiran dan perasaan pendengar atau pembaca. Dengan demikian, pers mampu mengembangkan tingkat kecerdasan yang diharapkan.

Pers juga mempunyai fungsi penerangan, yang dalam arti luas memberi informasi. Dalam fungsi penerangan, pers dibagi menjadi empat macam pekerjaan, yaitu pers sebagai karya pemilik, pers sebagai karya penghubung, pers sebagai alat membantu membentuk pendapat umum, sebagai alat kontrol dan memberi komentar atau tanggapan terhadap suatu peristiwa. Peran Pers secara operasional berfungsi memperkuat nasionalisme dalam bingkai keberagaman yang berorientasi membuka wawasan melalui filter informasi. Dalam fungsi ini Pers harus berfungsi secara bebas total, independen dan mandiri namun berwawasan kebangsaan.

Ilustrasi di atas menggambarkan betapa pers memiliki fungsi yang sangat transendental dalam kehidupan, karena kehidupan itu sendiri adalah *sunnatullah*, maka suatu kehidupan yang berperadaban memiliki landasan ideologi untuk mengkonstruksi kehidupannya agar menjadi masyarakat yang sejahtera.

Realitas kehidupan masyarakat selalu mengalami perkembangan ideologi, hal ini wajar karena manusia membutuhkan kesempurnaan dalam hidup. Aplikasi sebuah ideologi dalam komunitas selalu memiliki ketidaksempurnaan seiring dengan perkembangan pengetahuan, dari sini maka muncul wacana yang melahirkan para pemikir maupun pemerhati masalah-masalah sosial. Media massa merupakan alat atau mediator yang efektif dalam publikasi ideologi. Menurut (Eriyanto 2005) bahwa teks merupakan salah satu praktek ideologi, bahasa, tulisan, pilihan kata maupun struktur gramatika dipahami sebagai pilihan yang diungkapkan membawa makna ideologi tertentu dalam taraf memenangkan dukungan publik. Proses-proses ini diperjuangkan untuk mendapatkan pengakuan atau konstruksi realitas.

Hamad (Hamad 2004) menyatakan bahwa proses mengkonstruksi realitas melalui media massa, pada prinsipnya upaya mengkonseptualisasi sebuah peristiwa, keadaan atau benda tak terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik adalah usaha mengkonstruksi realitas. Media berusaha menyusun realitas dari berbagai peristiwa hingga menjadi wacana yang berarti. Dengan demikian, Hamad menyimpulkan bahwa seluruh isi media tiada lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan (*reconstructed reality*) dalam bentuk wacana yang bermakna.

Namun, Hamad memandang masalah teks wacana yang terpublikasi oleh publik terdapat tiga masalah mendasar, yaitu masalah makna (*the problem of meaning*), bagaimana orang lain memahami pesan, informasi apa yang terkandung dalam struktur sebuah pesan, masalah tindakan (*the problem of action*), atau pengetahuan bagaimana memperoleh sesuatu melalui pembicaraan serta masalah koherensi yang menggambarkan bagaimana membentuk suatu pola pembicaraan masuk akal (*logic*) dan dapat dimengerti (*sensible*).

Faktor-faktor di atas yang menyebabkan tingkat penyerapan, pemahaman, dan tindakan bervariasi, karena menurut (Nurudin 2003)

bahwa penyampaian teks melalui saluran komunikasi massa mempunyai efek yang berwujud pada tiga hal, yaitu efek kognitif (pengetahuan), afektif (emosional dan perasaan), dan behavioral (perubahan pada tingkah laku). Selain itu, muncul juga efek lain yang melatarbelakangi seperti individu yang bertolak dari gejala psikologi dan faktor sosial. Dari efek inilah muncul opini publik, yang biasanya tidak terorganisir serta menyebar pada berbagai tempat dan disatukan oleh isu tertentu dengan mengadakan kontak satu sama lain melalui media massa. Ilustrasi ini menyadarkan bahwa publikasi nilai-nilai nasionalisme melalui saluran media massa harus tepat sampai kepada pemahaman sasaran (penerima informasi).

Media masa dengan kebebasan publikasi berita/informasi memiliki peran ganda yakni media sebagai filter informasi dan sebagai media persatuan kesatuan bangsa. Media sebagai filter informasi dimaknai bahwa media memiliki kewenangan melakukan konseptualisasi realitas sosial. Proses konseptualisasi inilah yang perlu direkonstruksi menjadi potensi dalam membangun dan mengkampanyekan nasionalisme. Secara aplikatif insan media memandang bahwa realitas sosial dikemas dalam kerangka penguatan nilai-nilai nasionalisme. Kemudian media masa sebagai mediator kesatuan bangsa memiliki fungsi memberikan wawasan dan edukasi serta usaha-usaha preventif dalam mengurangi potensi intoleran dan pembangunan nilai-nilai nasionalisme bangsa.

Solusi Atas Tantangan Nasionalisme

Agama idealnya turut hadir sebagai bagian dari solusi atas persoalan radikalisme, konservatisme dan intoleransi yang mengancam nasionalisme Indonesia. Dalam konteks keagamaan terdapat prinsip toleran menghargai pluralitas. Hal ini karena keragaman adalah *sunnatullah* dan pemberian dari Tuhan. Hal ini mestinya mendorong manusia bekerja sama, bukan saling menghancurkan (Kompas 2017b).

Keragaman agama yang dipeluk masyarakat adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan sosial. Keragaman disatu sisi memperkaya dan menjadikan kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat penuh dinamika, tapi di sisi lain membawa potensi konflik antar umat beragama (Kompas 2017b).

Oleh karena itu, agama sebagai suatu institusi yang sangat individual (Ali 1971), dalam realitas sosial pemeluknya idealnya agama menjadi pemersatu aspirasi umat manusia yang paling sublime. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan kemampuan agama dalam memberikan panduan tentang nilai-nilai moral sehingga masyarakat pemeluk agama terdorong untuk menciptakan sistem sosial yang terpadu dan utuh (Solatun 2008).

Pendalaman agama harus dilakukan secara tepat, melalui lembaga pengkajian dan bacaan yang memadai, kepada pemuka agama yang *mafhum* dan memahami makna keragaman, tidak dilakukan secara instan melalui mesin pencari di dunia maya ataupun media sosial (Kompas 2017b).

Terkait hal tersebut, pemerintah juga tidak boleh tinggal diam. Menurut Allisa Wahid, ada tiga hal yang harus dilakukan negara. Pertama, Presiden memimpin rekonsiliasi diantara pihak-pihak yang terpecah dengan mengingatkan kembali pada nilai dasar bangsa, yakni Pancasila. Nilai-nilai bangsa harus ditegaskan. Setiap hal yang tidak sesuai dengan konstitusi tidak boleh dibiarkan. Jembatan komunikasi dengan berbagai pihak harus dibangun, tetapi negara memiliki sikap dan pendirian yang tegas sesuai konstitusi dan nilai-nilai dasar bangsa. Kedua, negara mesti mengajak semua pihak agar menghargai kedaulatan hukum. Ketiga, aparat penegak hukum harus menindak semua pihak yang menyebarkan ujaran kebencian diberbagai media (Kompas 2017c).

Kesimpulan dan Saran

Pertama, Kondisi objektif bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, baik secara fisik sebagai negara kepulauan maupun secara sosial budaya. Kemajemukan tersebut meliputi suku, bahasa, adat istiadat, dan agama. Akan tetapi, kemajemukan adalah *sunnatullah*, dan kemajemukan sesungguhnya bertujuan untuk saling melengkapi antara sesama manusia dan alam semesta.

Kedua, Konsep tentang pluralitas adalah bahwa pluralitas tidak hanya menunjuk adanya kenyataan kemajemukan, tetapi mengakui keberadaan dan hak agama lain serta terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan agar tercapai kerukunan dalam kebhinekaan.

Ketiga, nasionalisme dapat diartikan sebagai paham tentang kebangsaan dan sikap cinta tanah air yang tinggi yang harus dimiliki oleh warga negara, merasa memiliki sejarah dan cita-cita yang sama dalam tujuan berbangsa dan bernegara. Suatu bangsa hanya dapat muncul apabila terdapat keinginan untuk hidup bersama, bukan disebabkan persamaan ras, bahasa, agama atau batas-batas negeri. melainkan terbentuk karena pengalaman-pengalaman historis yang menjembatani kesediaan untuk berkorban bersama. Suatu bangsa adalah sekelompok manusia dengan persamaan karakter atau watak yang tumbuh karena persamaan nasib atau pengalaman yang telah dijalani. Nasionalisme merupakan suatu kesadaran rakyat sebagai suatu bangsa.

Keempat, untuk memahami hubungan antara agama dan nasionalisme, Balitbang Diklat Kementerian Agama pada 2015 melakukan penelitian tentang penggalian dan perumusan nilai-nilai agama yang terdapat di kitab suci, teologi, hukum dan etika keagamaan yang mendukung NKRI. Poin NKRI merujuk pada bentuk negara nasional, Pancasila, UUD 1945, dan kemajemukan. Hasilnya, dalam semua agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, semuanya terdapat ajaran-ajaran yang mendukung nasionalisme. Dalam Islam dikenal beberapa terminologi yang mendekati konsep kebangsaan, yaitu *ummah*, *syu'b* dan *qawn*. *Ummah* dalam Bahasa Indonesia menjadi *umat*. Kata '*umm*' mengandung pengertian sekelompok manusia yang berhimpun karena didorong oleh ikatan persamaan sifat, kepentingan, cita-cita, agama, wilayah tertentu dan waktu tertentu. *Syu'b*. *syu'bah* dan *insyi'ab* adalah istilah yang mempunyai arti bahwa bangsa manusia di bumi terbagi dalam berbagai cabang (*syu'bah*). *Qawn*. *Qawn* akar katanya terdiri dari *qaf*, *wau* dan *mim* memiliki dua makna dasar, yaitu kelompok manusia dan berdiri tegak atau tekad.

Kelima, tantangan nasionalisme dewasa ini adalah globalisasi dan Fundamentalisme, radikalisme, dan konservatisme. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sepakat bersama-sama menjaga Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. NU dan Muhammadiyah juga mampu membendung radikalisme dan intoleransi yang terjadi di masyarakat.

Keenam, Agama idealnya turut hadir sebagai bagian dari solusi atas persoalan radikalisme, konservatisme, dan intoleransi yang mengancam nasionalisme Indonesia. Dalam konteks keagamaan terdapat prinsip toleran menghargai pluralitas. Hal ini mestinya mendorong manusia bekerja sama. Pendalaman agama harus dilakukan secara tepat, melalui lembaga pengkajian dan bacaan yang memadai, kepada pemuka agama yang *mafhum* dan memahami makna keragaman, tidak dilakukan secara instan melalui mesin pencari di dunia maya ataupun media sosial. Pemerintah juga tidak boleh tinggal diam. ada tiga hal yang harus dilakukan negara. Pertama, Presiden memimpin rekonsiliasi diantara pihak-pihak yang terpecah dengan mengingatkan kembali pada nilai dasar bangsa, yakni Pancasila. Kedua, negara mesti mengajak semua pihak agar menghargai kedaulatan hukum. Ketiga, aparat penegak hukum harus menindak semua pihak yang menyebarkan ujaran kebencian diberbagai media. Keempat, media menjalankan fungsinya sebagai pemberi informasi dengan semangat jurnalisme damai.

Daftar Pustaka

- Al-faqi, Mifdal Zusron. 2015. "Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas." *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28(2).
- Ali, Mukti. 1971. *Religion and Development In Indonesia*. Yogyakarta: Nida.
- Anggraeni, Kusumawardani and Faturochman. 2004. "Nasionalisme." *Buletin Psikologi* 12(2).
- Aswar, Hasbi. 2016. "Respon Nahdlatul Ulama Terhadap Gagasan Politik Islam Radikal Di Indonesia." *Thaqafiyat* 17(1).
- Asyari, KH. Hasyim. 2017. "Agama Dan Nasionalisme." *NU Jateng*. Retrieved (<https://nujateng.com/2017/07/agama-dan-nasionalisme/>).
- Aydin, Mehmet. S. 2009. "Islam Dan Tantangan Pluralisme." in *Islam dan Pluralisme Agama*, edited by D. Effendi. Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei.

- Azra, Azyumardi. 2017. "Agama Dan Nasionalisme." *Republika*.
- Bulac, Ali. 2003. "*Piagam Madinah*" Dalam Charle Kurzzman, *Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*. Jakarta: Paramadina.
- Dahlan, Moh. 2014. "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia." *Jurnal ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 14(1).
- Eriyanto. 2005. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa*. Jakarta: Penerbit Granit.
- Kahin, George Mc Turnan. 1995. *Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Kahmad, Dadang. 2002. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kompas. 2017a. "Dirancang, Format Baru Pembumian Pancasila." *Kompas*.
- Kompas. 2017b. "Diskusi Panel Kompas, Ujian Daya Tahan Indonesia." *Kompas*.
- Kompas. 2017c. "Perkuat Keindonesiaan." *Kompas*.
- M.N., Gufron. 2005. "Hubungan Control Diri Dan Persepsi Remaja Terhadap Penerapan Disiplin Orang Tua Dengan Prokrastinasi Akademik." Universitas Gadjah Mada.
- Madjid, Nurcholish. 2000. *Islam Doktrin Dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Muslich, HM. and Adnan Qohar. 2013. *Nilai Universal Agama-Agama Di Indonsia Menuju Indonesia Damai*. Yogyakarta: Kaukaba Dirgantara.
- Niam, Mukafi. 2016. "Pandangan Agama Agama Di Indonesia Terhadap Nasionalisme." *NU Online*. Retrieved (<http://www.nu.or.id/post/read/72408/pandangan-agama-agama-di-indonesia-terhadap-nasionalisme>).
- Nurdin, Ali. 2006. *Quranic Society*. Jakarta: Erlangga.
- Nurudin. 2003. *Komunikasi Massa*. Malang: Cespur.

- Pulungan, Suyuti. 1994. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rozak, Abdul. 2008. "Komunikasi Lintas Agama, Modal Sosial Pembentukan Masyarakat Sipil." *Jurnal Dakwah* 9(1).
- Shihab, Alwi. 1999. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Shihab, Quraish. 2000. *Wawasan Qur'an, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan Pustaka.
- Siradj, Said Aqil. 2005. "Beragama Dan Pembelajaran Pluralitas." *Republika*.
- Siradj, Said Aqil. 2017a. "Halaqah Nasional Alim Ulama."
- Siradj, Said Aqil. 2017b. "Nasionalisme Merupakan Bagian Dari Iman." *Republika*.
- Solatun. 2008. "Komunikasi Antaragama: Sebuah Studi Hermeneutik." in *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Rosda.
- Suhandang, Kustadi. 2004. *Pengantar Jurnalistik, Seputar Organisasi, Produk Dan Kode Etik*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Suseno, Franz Magnis. 2006. *Berebut Jiwa Bangsa, Dialog, Perdamaian Dan Persaudaraan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Truna, Dody S. 2010. *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Yatim, Badri. 1999. *Soekarno, Islam Dan Nasionalisme*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu.
- Zaini, Helmy Faishal. 2017. "Nasionalisme Kaum Sarungan." *Kompas*.

